PANDUAN INTERNASIONAL TENTANG PERENCANAAN KOTA DAN WILAYAH

INTERNATIONAL GUIDELINES ON URBAN AND TERRITORIAL PLANNING
BAHASA VERSION

UN-HABITAT
FOR A BETTER URBAN FUTURE

Panduan Internasional tentang Perencanaan Kota dan Wilayah

Diterbitkan pertama kali di Nairobi tahun 2015 oleh UN-Habitat
Hak Cipta © United Nations Human Settlements Programme 2015

Hak cipta dilindungi undang-undang
United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat)
P. O. Box 30030, 00100 Nairobi GPO KENYA
Tel: 254-020-7623120 (Central Office)
www.unhabitat.org

HS Number: HS/059/15B

Dukungan dan Kontribusi Pembiayaan: Pemerintah Jepang, Perancis, Norwegia, Afrika Selatan, Swedia

Penyangkalan
Peristilahan yang dipergunakan dan presentasi materi dalam penerbitan ini tidak mewakili ungkapan pendapat apapun dari pihak Sekretariat PBB mengenai status hukum dari negara, wilayah, kota atau daerah atau otoritasnya, atau mengenai penandaan batas wilayah. Pandangan-pandangan yang dinyatakan dalam publikasi ini tidak merupakan cerminan pandangan dari the Program Permukiman PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau negara-negara anggotanya.

Kutipan dapat direproduksi tanpa izin, dengan syarat menyebutkan sumbernya

PANDUAN INTERNASIONAL TENTANG PERENCANAAN KOTA DAN WILAYAH

INTERNATIONAL GUIDELINES ON URBAN AND TERRITORIAL PLANNING
BAHASA VERSION

UN HABITAT

Kata Pengantar

Dengan penduduk perkotaan dunia telah melampaui ambang batas lima puluh persen dari penduduk global, telah menjadi semakin jelas bahwa kehidupan urban menjadi masa depan. Urbanisasi maju pesat, khususnya di negara-negara berkembang, dan diikuti dengan berbagai peluang dan tantangan.

Aglomerasi memungkinkan adanya skala ekonomi yang signifikan untuk kota dan daerah, tetapi juga menimbulkan berbagai biaya dan eksternalitas yang terkait dengan kebisingan, kemacetan, dan polusi. Tantangan global seperti perubahan iklim dan terkurasnya sumber daya mempengaruhi banyak bidang dalam berbagai cara dan membutuhkan respons-respons baru yang inovatif.

Dalam rangka menghadapi tantangan tersebut, pendekatan yang berbeda untuk perencanaan telah diuji dan diterapkan di seluruh dunia. Meskipun ada pelajaran berharga yang dipetik dari berbagai ragam upaya yang dilakukan, Panduan Internasional tentang Perencanaan Kota dan Wilayah (*Panduan*) dirancang untuk mengisi kritisnya kesenjangan dengan menyediakan kerangka acuan untuk perencanaan yang berguna di berbagai skala dan dapat disesuaikan dengan konteks kekhasan, baik wilayah, nasional maupun lokal.

Sebagai respons terhadap Resolusi 24/3 The Governing Council UN-Habitat, *Panduan* ini telah dikembangkan melalui proses konsultatif yang luas dan disusun di atas serangkaian pengalaman. Panduan ini menyajikan dua belas prinsip yang dapat memandu para pengambil keputusan dalam mengembangkan atau merevisi kebijakan, rencana, dan desain melalui pendekatan perencanaan terpadu.

Panduan telah disetujui oleh Governing Council dalam Resolusi 25/6 tanggal 23 April 2015. Selain itu pula, Resolusi ini menyerukan kepada "lembaga keuangan internasional, badan-badan pembangunan, dan UN Habitat untuk membantu negara-negara anggota yang berkeinginan menggunakan dan mengadaptasi *Panduan* ini untuk wilayah mereka dan konteks nasional, sehingga memungkinkan, dan mengembangkan alat-alat dan indikator-

indikator lanjutannya untuk pemantauan." Panduan telah dirancang untuk melengkapi Panduan Internasional tentang Desentralisasi dan Penguatan Otoritas Lokal (*Guidelines on Decentralisation and the Strengthening of Local Authorities, 2007*), serta Panduan Internasional tentang Akses terhadap Layanan Dasar bagi Semua (*International Guidelines on Access to Basic Services for All, 2009*), yang sebelumnya diadopsi oleh Governing Council UN Habitat dan yang telah dirujuk di sejumlah negara. Selanjutnya, *Panduan Internasional tentang Perencanaan Kota dan Wilayah* dirancang untuk mendukung pelaksanaan Agenda Pembangunan Pasca-2015, dan New Urban Agenda atau Agenda Urban Baru dalam Konferensi PBB tentang Perumahan dan Pembangunan Urban Berkelanjutan (Habitat III) pada tahun 2016.

Panduan ini relevan bagi berbagai pengguna: pemerintah nasional, pemerintah daerah, masyarakat sipil dan perencana profesional. *Panduan* ini menekankan peran yang dimiliki para aktor dalam menyusun bentuk dan fungsi permukiman manusia. Adalah harapan saya setulusnya bahwa *Panduan* ini dapat memberikan inspirasi dan arah untuk membantu pembangunan kota-kota dan wilayah yang lebih kompak, inklusif secara sosial, terhubungkan, dan terintegrasi secara lebih baik.

Dr. Joan Clos
Direktur Eksekutif, UN-Habitat

Daftar Isi

I. LATAR BELAKANG VI

A. Tujuan 1
B. Definisi dan Ruang Lingkup 2
C. Konteks dan Dasar Pertimbangan 4
D. Proses Penyiapan 5

II. IPANDUAN INTERNASIONAL TENTANG PERENCANAAN KOTAN DAN WILAYAH 7

A. Kebijakan dan Tata Kelola Perkotaan 8
B. Perencanaan Kota dan Wilayah Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan 13
B1. Perencanaan Kota dan Wilayah dan Pembangunan Sosial 14
B2. Perencanaan Kota dan Wilayah dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berlanjut 17
B3. Perencanaan Kota dan Wilayah dan Lingkungan Hidup 20
C. Komponen Perencanaan Kota dan Wilayah 23
D. Pelaksanaan dan Pemantauan Perencanaan Kota dan Wilayah 27

I

LATAR BELAKANG

A. Tujuan

dengan cepat. Penduduk perkotaan tumbuh dari 746 juta pada tahun 1950 (29,6 persen dari populasi dunia) menjadi 2,85 miliar pada tahun 2000 (46,6 persen), dan telah mencapai 3,96 miliar pada tahun 2015 (54 persen). Ini diharapkan mencapai total 5,06 miliar pada tahun 2030 (60 persen dari populasi dunia). Dalam menanggapi transformasi ini, Panduan Internasional tentang Perencanaan Kota dan Wilayah (*Panduan*) dimaksudkan dapat menjadi kerangka kerja untuk meningkatkan kebijakan global, rencana, desain dan proses implementasi, yang akan menjadikan kota-kota dan wilayah yang lebih kompak, inklusif secara sosial, dan terhubungkan dan terintegrasi secara lebih baik serta mendorong pembangunan perkotaan berkelanjutan dan tangguh terhadap perubahan iklim.

Tujuan *Panduan* ini dirumuskan sebagai berikut:

- untuk mengembangkan kerangka acuan yang berlaku universal dalam memandu reformasi kebijakan perkotaan;
- untuk mencatat prinsip-prinsip universal dari pengalaman nasional dan lokal yang dapat mendukung pengembangan pendekatan perencanaan yang beragam disesuaikan dengan konteks dan skala yang berbeda-beda;
- untuk melengkapi dan menghubungkan ke Panduan internasional lainnya yang bertujuan mendorong pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;
- untuk meningkatkan dimensi kota dan wilayah dalam agenda pembangunan nasional, regional dan pemerintahan daerah.

Pemandangan Paris dari udara © Flickr/Mortimer62

B. Definisi dan Ruang Lingkup

Perencanaan kota dan wilayah dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan untuk mewujudkan tujuan-tujuan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup melalui pengembangan visi tata ruang, strategi dan rencana, dan penerapan seperangkat prinsip-prinsip kebijakan, alat-alat, mekanisme partisipatif kelembagaan, dan prosedur pengaturan.

Perencanaan kota dan wilayah tak terpisahkan dari fungsi ekonomi yang mendasar. Ini adalah mekanisme yang ampuh untuk menyusun kembali bentuk dan fungsi kota-kota dan wilayah untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi secara endogen, membuka lapangan kerja dan membangun kemakmuran, sekaligus memenuhi kebutuhan kelompok yang paling rentan, terpinggirkan atau yang kurang terlayani.

Panduan ini mengajukan prinsip-prinsip pokok dan rekomendasi perencanaan kota dan wilayah yang dapat membantu semua negara dan kota-kota untuk secara efektif mengarahkan perubahan demografi perkotaan (pertumbuhan, stagnasi atau penurunan) dan meningkatkan kualitas hidup di permukiman urban, baik yang ada sekarang maupun yang baru. Dengan mempertim-bangkan prinsip subsidiaritas atau penjenjangan dan pengaturan tata kelola secara spesifik untuk setiap negara, *Panduan* ini harus digunakan dengan

- **Pada tingkat nasional,** rencana nasional dapat mengambil keuntungan dari kutub-kutub ekonomi dan infrastruktur besar, baik yang ada maupun yang direncanakan dalam rangka untuk mendukung, menstrukturkan, dan menyeimbangkan sistem kota-kota, termasuk di koridor perkotaan dan daerah aliran sungai, untuk sepenuhnya mampu mewujudkan potensi ekonomi mereka;

- **Pada tingkat wilayah-kota dan metropolitan,** rencana wilayah secara sub-nasional dapat mendorong pembangunan ekonomi dengan mengetengahkan skala ekonomi wilayah dan aglomerasi, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan, memperkuat hubungan kota-desa dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, mengurangi risiko bencana dan intensitas penggunaan energi, mengatasi kesenjangan sosial dan tata ruang dan memajukan kohesi wilayah dan kesaling-lengkapan pada daerah, baik yang berkembang maupun yang sedang mengalami kemerosotan;

- **Pada tingkat kota dan pemerintah daerah,** strategi pembangunan kota dan rencana pembangunan terpadu dapat memprioritaskan keputusan investasi serta mendorong sinergi dan interaksi di antara beberapa kawasan perkotaan yang terpisah. Rencana

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：
https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=5_18568